

KEMENTERIAN PERHUBUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA

Jl. Medan Merdeka Barat No. 8 Jakarta 10110

Telp.: 350 5006

350 7972

Fax.: 34832663

Nomor: SE, DIS THHW 2018

TENTANG

KETENTUAN MEMBAWA PENGISI BATERAI PORTABEL (POWER BANK) DAN BATERAI LITHIUM CADANGAN PADA PESAWAT UDARA

- 1. Berkaitan dengan adanya potensi resiko bahaya meledak/kebakaran pada *Power Bank* atau Baterai Lithium cadangan, maka dalam rangka menjamin keselamatan penerbangan:
 - Badan Usaha Angkutan Udara dan Perusahaan Angkutan Udara Asing diinstruksikan untuk:
 - 1) menanyakan kepada setiap penumpang pada saat proses lapor diri (check-in) terkait kepemilikan Pengisi Baterai Portabel (Power Bank) atau Baterai Lithium cadangan;
 - 2) memastikan bahwa Pengisi Baterai Portabel (Power Bank) atau Baterai Lithium cadangan yang dibawa penumpang dan personel pesawat udara harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:
 - a) Pengisi Baterai Portabel (Power Bank) atau Baterai Lithium cadangan yang dibawa di pesawat udara tidak terhubung dengan perangkat elektronik lain;
 - b) Pengisi Baterai Portabel (Power Bank) atau Baterai Lithium cadangan harus ditempatkan pada bagasi cabin dan dilarang pada bagasi tercatat.
 - c) Pengisi Baterai Portabel (Power Bank) atau Baterai Lithium cadangan yang mempunyai daya jam (watt-hour) tidak lebih dari 100 Wh dapat dibawa oleh penumpang.
 - d) Pengisi Baterai Portabel (Power Bank) atau Baterai Lithium cadangan yang mempunyai daya per jam (watt-hour) lebih dari 100 Wh tapi tidak lebih dari 160 Wh harus mendapatkan persetujuan dari Badan Usaha Angkutan Udara dan Perusahaan Angkutan Udara Asing dan diperbolehkan untuk dibawa maksimal 2 (dua) unit per penumpang.
 - e) Pengisi Baterai Portabel (Power Bank) atau Baterai Lithium cadangan yang mempunyai daya jam lebih dari 160 Wh atau besarnya daya jam (watt-hour) tidak dapat diidentifikasi dilarang dibawa ke pesawat udara.
 - f) Baterai Portable (Power Bank) atau Baterai Lithium cadangan yang tidak mencantumkan keterangan jumlah Wh maka perhitungan jumlah Wh dapat diperoleh dengan cara:
 - i. Apabila jumlah tegangan/voltase (V) dan jumlah arus/kapasitas (Ah) diketahui maka perhitungan daya per jam (Wh) dapat dikalkulasikan dengan rumus:

 $\mathbf{E}_{(\mathbf{Wh})} = \mathbf{V}_{(\mathbf{V})} \times \mathbf{I}_{(\mathbf{Ah})}$

E = daya jam, satuannya adalah watt-hour (Wh),

V = tegangan, satuannya adalah volt (V),

I = arus, satuannya adalah ampere (Ah).

ii. Apabila hanya diketahui miliampere (mAh) maka untuk mendapatkan ampere-hour (Ah) harus dibagi 1000, dengan contoh:

Jumlah voltase: 5 V

Jumlah kapasitas: 6000 mAh Sehingga jumlah daya per jam =

> 6000 mAh : 1000 = 6 Ah $5 \text{ V} \times 6 \text{ Ah} = 30 \text{ Wh}$

- 3) bertanggungjawab untuk menyimpan *Power Bank* yang diserahkan oleh pemilik pada *check-in counter* karena tidak memenuhi ketentuan.
- 4) melarang penumpang dan personel pesawat udara melakukan pengisian daya ulang dengan menggunakan *Pengisi Baterai Portabel (Power Bank)* pada saat penerbangan.
- b. Unit Penyelenggara Bandar Udara, Badan Usaha Bandar Udara dan Penyelenggara Bandar Udara Khusus diinstruksikan untuk:
 - 1) menginfomasikan kepada setiap penumpang dan personel pesawat udara terkait ketentuan membawa *Pengisi Baterai Portabel (Power Bank)* dan *Baterai Lithium* cadangan pada pesawat udara sebagaimana tercantum dalam huruf a.
 - 2) meminta kepada penumpang untuk menunjukan dan mengeluarkan *Power Bank* dari bagasi cabin dan bagasi tercatat yang dibawa pada saat proses pemeriksaan di *Security Check Point* (SCP) untuk dilakukan pemeriksaan besaran daya sesuai dengan ketentuan huruf a.2) dan memastikan penumpang dan personel pesawat udara tidak membawa *Pengisi Baterai Portabel* (*Power Bank*) dan *Baterai Lithium* cadangan dalam bagasi tercatat.
 - 3) memastikan daya Jam *Pengisi Baterai Portabel (Power Bank)* dan *Baterai Lithium* cadangan yang ditemukan saat pemeriksaan keamanan di *Security Check Point* (SCP) sesuai dengan ketentuan huruf a. 2).
 - 4) bertanggungjawab untuk meyimpan *Power Bank* yang diserahkan oleh pemilik pada *Security Check Point* (SCP) karena tidak memenuhi ketentuan.
 - 5) untuk segera menindaklanjuti larangan ini dengan membuat Standard Operating Procedure (SOP).
- c. Kantor Otoritas Bandar Udara diinstruksikan untuk melaksanakan pengawasan atas pelaksanaan Surat Edaran ini.
- 2. Demikian, untuk dapat dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal q Maret 2018

DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA

PERHUBUNGAN UDANA

Dr. Ir. AGUS SANTOSO, M.Sc

Pembina Utama Madya (IV/d) NIP. 19580804 199711 1 001

Kepada Yth.:

- 1. Para Kepala Kantor Otoritas Bandar Udara;
- 2. Para Kepala Unit Penyelenggara Bandar Udara;
- 3. Para Pimpinan Badan Usaha Angkutan Udara;
- 4. Para Pimpinan Kantor Perwakilan Perusahaan Angkutan Udara Asing;
- 5. Para Pimpinan Badan Usaha Bandar Udara; dan
- 6. Para Pimpinan Penyelenggara Bandar Udara Khusus.

Tembusan Yth.:

- 1. Menteri Perhubungan; dan
- 2. Sekretaris Jenderal Kementerian Perhubungan.